

# **KESIAPAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM TENUN IKAT DI KOTA KEDIRI**

**Oleh:  
Peggy Indianty**

**Dosen Pembimbing:  
Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Tenun Ikat di Kota Kediri dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan dalam penelitian ini. Kesiapan implementasi SAK EMKM dalam penelitian ini dinilai berdasarkan tiga indikator penilaian yaitu kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana pendukung, dan kesiapan komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh UMKM tenun ikat belum siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Hal tersebut dikarenakan seluruh UMKM belum memenuhi ketiga indikator penilaian. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAK EMKM merupakan masalah yang timbul dari setiap indikator penilaian yang digunakan. Kendala dari sumber daya manusia yaitu pemahaman akuntansi yang sekedarnya, pengalaman yang nihil, dan pelatihan yang tak berbekas. Kendala dari sarana pendukung yaitu *hardware* yang belum dimanfaatkan dan *software* akuntansi yang belum dimiliki.

**Kata Kunci: Kesiapan Implementasi, SAK EMKM, UMKM, Sumber Daya Manusia**

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Indonesia. UMKM bahkan dianggap sebagai salah satu komponen dalam penguatan perekonomian nasional oleh karena karakteristiknya yang kuat, dinamis, dan efisien. UMKM terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 60 persen dan sekaligus menyerap 97 persen tenaga kerja produktif di Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai penyangga perekonomian nasional di saat krisis (IAI, 2016). Menurut berita yang dilansir dari *Sindo News Online* (2018), jumlah pasti UMKM di Indonesia per Desember

2017 memang belum diumumkan secara resmi namun data terakhir pada semester I 2017 adalah sekitar 60 juta UMKM. Adapun perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) pada awal 2017 adalah sebesar 61,41%, sedangkan selama tahun 2009-2015 meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% (Kemenperin, 2016).

Namun beberapa keberhasilan tersebut tidak menjamin bahwa UMKM tidak memiliki kendala dalam melakukan kegiatan usahanya. Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM saat ini masih menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usahanya dan tidak adanya pemisahan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Padahal untuk mengembangkan sebuah usaha dengan maksimal dibutuhkan modal yang besar dan adanya pemisahan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Putra dan Kurniawati (2012) menyatakan hal tersebut disebabkan UMKM terlalu fokus terhadap kegiatan operasional, sehingga seringkali mengabaikan tentang pencatatan dan pelaporan. Selain itu, latar belakang pendidikan yang tidak memahami tentang akuntansi atau tata buku, kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, dan tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi, juga turut menjadi penyebab UMKM mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

Alfitri *et al* (2014) mengungkapkan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengetahui Laporan keuangan merupakan informasi historis sekaligus hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan tersebut maka diperlukan adanya standar dalam penyusunannya (Lestari dan Priyadi, 2017).

Di Indonesia sendiri telah terdapat peraturan yang mewajibkan UMKM untuk menyusun pembukuan kegiatan usaha, dimana hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun pada kenyataannya masih banyak UMKM yang tidak menyediakan laporan keuangan yang sesuai standar. Hal ini mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) akhirnya menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) pada 17 Juli 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Namun, penerapan SAK ETAP tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM. Masih banyak UMKM yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa UMKM masih enggan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP karena beberapa pengaruh dan kendala. Alfitri *et al* (2014) mengungkapkan kendala yang dihadapi UMKM dalam menerapkan SAK ETAP antara lain kurangnya pengetahuan tentang SAK ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang profesional, kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, serta kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang SAK ETAP. Pratiwi dan Hanafi (2016) memaparkan dalam penelitiannya bahwa pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan UMKM, dan ukuran usaha memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP.

Untuk mengurangi kendala-kendala tersebut, DSAK IAI akhirnya kembali menerbitkan sebuah standar yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi UMKM yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). DSAK IAI mengesahkan *Exposure Draft* SAK EMKM pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku efektif per 1 Januari 2018 (IAI, 2016). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dengan adanya beberapa pembaruan dibandingkan dengan SAK ETAP. Dengan adanya SAK EMKM tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan tepat tanpa harus kesulitan oleh kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini, dan sekaligus dapat menjadi pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Selain itu, kedepannya penerbitan SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan, pengembangan pedoman, dan panduan akuntansi bagi UMKM (IAI, 2016).

UMKM sebagai pendorong kemajuan perekonomian Indonesia tentunya berangkat dari keberhasilan UMKM yang berada pada setiap daerah, khususnya Kota Kediri, Jawa Timur. Kota berpenduduk lebih dari 280 ribu jiwa ini merupakan salah satu kota yang gencar memberdayakan masyarakatnya untuk bergerak dalam bidang industri mikro, kecil, maupun menengah. Menurut Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 tercatat sebanyak 39.932 unit usaha yang terdiri dari

38.806 usaha mikro kecil (UMK) dan 1.126 usaha menengah besar (UMB). Sementara data SE tahun 2006 tercatat adanya 33.411 unit usaha. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah unit usaha yang signifikan yakni sebesar 19,51% selama 10 tahun. Pada sektor tenaga kerja, usaha kecil di Kota Kediri mampu menyerap sebanyak 58,20% dari total tenaga kerja sebesar 85.255 orang (RRI *Online*, 2017).

Salah satu sektor UMKM yang berpotensi cukup besar di Kota Kediri adalah sentra kerajinan tenun ikat. Andriani (2013) mengungkapkan bahwa Kelurahan Bandar Kidul memiliki kerajinan tenun ikat dengan menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang merupakan tradisi turun-temurun yang telah ada sejak dahulu. Salah satu penggiat kerajinan tenun ikat di Kota Kediri mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota memberikan ruang yang cukup lebar dalam proses pengenalan dan pemasaran produk tenun ikat khas Kediri tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya usaha Pemerintah membawa produk tenun ikat ke pameran di Amerika. Selain itu, negara Jepang pun juga tengah melirik kreatifitas dari tenun ikat khas Kota Kediri tersebut melalui penawaran pembuatan desain pakaian kimono menggunakan kain tenun ikat Kota Kediri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM tenun ikat di Kota Kediri. Sepengetahuan peneliti, belum tersedia penelitian yang meneliti tentang kesiapan implementasi SAK EMKM oleh UMKM. Oleh karena itu, kesiapan implementasi SAK EMKM dalam penelitian ini akan dinilai melalui beberapa indikator yang diambil berdasarkan penelitian sebelumnya tentang analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yakni sumber daya manusia, sarana pendukung, dan komitmen organisasi.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi**

Kesiapan implementasi dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu terkait kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Indikator penilaian yang digunakan yakni sumber daya manusia, sarana pendukung, dan komitmen

organisasi. Azhar (2008) menyatakan sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia pada sebuah organisasi yang meliputi latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugas, dan kesiapan dalam melakukan perubahan terkait penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi (Sulaiman dan Abdullah, 2016). Menurut Norfaliza (2015), perangkat pendukung merupakan seperangkat alat-alat tambahan yang berfungsi untuk membantu seseorang, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Sarana pendukung adalah seperangkat alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti *hardware*, *software*, dan lain lain (Azhar, 2008). Azhar (2008) juga menyatakan bahwa komitmen adalah suatu keyakinan dan dukungan yang kuat pada sebuah proses yakni penerapan peraturan baru dapat mencapai keberhasilan. Menurut Robbins dan Judge (dikutip oleh Pratiwi *et al*, 2017) komitmen didalam organisasi adalah sejauh mana tingkat seorang pegawai memihak sebuah organisasi dan tujuan-tujuan serta adanya keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasinya.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Adapun definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Adapun definisi usaha menengah adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil memiliki pekerja 1-19 orang, usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, dan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Namun SAK EMKM juga dapat digunakan oleh entitas diluar kriteria tersebut diatas, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016:1).

### **Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM**

Menurut SAK EMKM (2016:3), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas bagi sejumlah pengguna dalam rangka pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK EMKM terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menggunakan beberapa asumsi dasar antara lain dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Dasar akrual digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan entitas dimana pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk setiap pos tersebut. Kelangsungan usaha dimaksudkan bahwa manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas disebut memiliki kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. Konsep entitas bisnis dimaksudkan bahwa setiap entitas bisnis baik usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis maupun dengan entitas lainnya. Pemisahan tersebut juga berlaku dalam hal transaksi bisnis yang terjadi antara pemilik bisnis dan transaksi entitas lainnya (SAK EMKM, 2016:6).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Moleong (2016:6) mengemukakan pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Adapun penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data yang menjelaskan tentang karakteristik orang, kejadian, atau keadaan (Sekaran, 2013:97). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti akan menggambarkan hasil penelitian ke dalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana kesiapan implementasi SAK EMKM dan kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM di Kota Kediri.

### **Objek Penelitian**

Sugiyono (2014:20) menyatakan bahwa obyek penelitian merupakan suatu atribut, sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dimana ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik

kesimpulan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM industri tenun ikat di Kota Kediri. Alasan pemilihan objek penelitian telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah pemilik UMKM industri tenun ikat di Kota Kediri.

### **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dimana berhubungan dengan variabel-variabel minat untuk tujuan penelitian tertentu (Sekaran, 2013:113). Data primer tersebut diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan informan terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Moleong (2016:186) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Tipe wawancara dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur dengan informan terkait. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Apabila selama proses wawancara ditemukan informasi baru, maka peneliti akan menggali informasi tersebut secara lebih mendalam. Pencatatan data wawancara dibagi atas 2 (dua) yakni dilakukan oleh peneliti sendiri, dan dengan menggunakan alat perekam.

### **Indikator Penilaian Kesiapan Implementasi**

Kesiapan implementasi SAK EMKM akan dinilai melalui beberapa indikator seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Nasution *et al* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai variabel moderating pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara memaparkan definisi operasional dan indikator terkait variabel penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan definisi operasional dan indikator tersebut dengan penyesuaian sesuai konteks dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Penilaian Kesiapan Implementasi**

<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Sub-indikator</b>
Sumber Daya Manusia	Kemampuan sumber daya manusia secara individu yang memiliki tugas untuk mencapai tujuan organisasi untuk implementasi SAK EMKM.	1. Tingkat pendidikan 2. Pemahaman akuntansi 3. Pengalaman 4. Pelatihan
Sarana Pendukung	Ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi SAK EMKM.	1. <i>Hardware</i> 2. <i>Software</i> 3. Jaringan
Komitmen Organisasi	Sikap yang tangguh dan memegang prinsip kuat untuk keberhasilan dalam implementasi SAK EMKM.	1. Kepeduliaan terhadap perkembangan UMKM 2. Kesiediaan bekerja ekstra untuk kemajuan UMKM

Sumber: Nasution *et al* (2016)

### **Informan**

Informan dalam penelitian ini merupakan pemilik UMKM Tenun Ikat di Kota Kediri. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini.

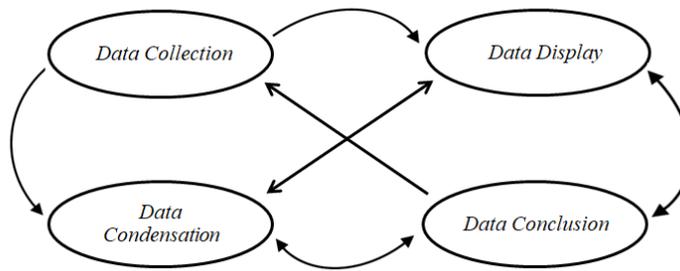
<b>No.</b>	<b>Nama UMKM Tenun Ikat</b>	<b>Nama Pemilik</b>	<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>
1.	Kodok Ngorek 2	Umi Hanafiyah	Kediri, 18 Juni 1975
2.	Medali Mas	Siti Ruqoyah	Nganjuk, 1 April 1969
3.	Sinar Barokah	Sudarman	Kediri, 30 Juni 1957
4.	Bandoel Djaya	Erwin Wahyu Nugroho	Kediri, 05 Februari 1982
5.	AAM Putra	Eko Hariyanto	Kediri, 22 Juni 1981
6.	Siffa	Ifa Kuriah	Kediri, 10 Mei 1985

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

### Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

**Gambar 3.1**  
**Skema Model Analisis Interaktif**



**Sumber: Miles dan Huberman (2014)**

### MENILAI KESIAPAN IMPLEMENTASI SAK EMKM

#### Kriteria Penggolongan UMKM

UMKM tenun ikat yang menjadi objek dalam penelitian ini akan digolongkan menurut hasil penjualan tahunan yang dimiliki oleh masing-masing UMKM. Penggolongan tersebut sesuai dengan kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut merupakan tabel penggolongan UMKM tenun ikat berdasarkan hasil penjualan tahunan.

No.	Nama UMKM Tenun Ikat	Hasil Penjualan Tahunan	Jenis Usaha
1.	Kodok Ngorek 2	Rp 360.000.000	Kecil
2.	Medali Mas	Rp 3.000.000.000	Menengah
3.	Sinar Barokah	Rp 3.000.000.000	Menengah
4.	Bandoel Djaya	Rp 84.000.000	Mikro
5.	AAM Putra	Rp 96.000.000	Mikro
6.	Siffa	Rp 360.000.000	Kecil

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

## **Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan bisnis. Kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini terkait dengan kesiapannya untuk mengimplemetasikan SAK EMKM. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang terdiri dari pemilik dan karyawan dinilai kualitasnya melalui beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, pengalaman dalam membuat laporan keuangan, dan pelatihan dalam bidang keuangan maupun bidang lain.

## **Tingkat Pendidikan Pelaku UMKM**

Tingkat pendidikan pemilik maupun karyawan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bisnis. Wicaksono (2015) mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikan terakhir para pelaku usaha mempengaruhi persepsi pentingnya laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Begitu pula dalam penelitian ini, semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik maka akan semakin terbuka pemikiran akan banyak hal yang berhubungan dengan usahanya, dan memberikan pengaruh terhadap tanggapan pemilik dengan adanya standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. Berikut merupakan rangkuman tingkat pendidikan pemilik dan tingkat pendidikan karyawan beserta jumlahnya pada tiap UMKM tenun ikat.

**Tabel 4.1**  
**Pendidikan Pemilik, Pendidikan Karyawan, dan Jumlah Karyawan**

No.	Nama UMKM Tenun Ikat	Tingkat Pendidikan Pemilik	Tingkat Pendidikan Karyawan	Jumlah Karyawan
1.	Kodok Ngorek 2	SMA	SMP-SMA	25 orang
2.	Medali Mas	D-2 (SLB)	SD-SMA	98 orang
3.	Sinar Barokah	SMP	SMP-SMA	15 orang
4.	Bandoel Djaya	SMK	SMA	15 orang
5.	AAM Putra	S-1 (Ekonomi)	SMP	27 orang
6.	Siffa	SMA	SMP-SMA	40 orang

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan beberapa pemilik dan karyawan pada UMKM tenun ikat sudah cukup merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentu dilihat dari 2 (dua) bidang yang berbeda yakni bidang keuangan untuk pemilik, dan bidang produksi untuk karyawan. Dalam penelitian ini, penilaian kesiapan implemetasi SAK EMKM hanya akan difokuskan pada tingkat pendidikan pemilik, karena seluruh informan sebagai pemilik UMKM tenun ikat menyatakan mengurus sendiri keuangan usahanya. Oleh karena itu, peneliti memilih memfokuskan penilaian kesiapan pada sub indikator ini hanya untuk tingkat pendidikan pemilik yakni pendidikan minimal setingkat menengah atas.

### **Pemahaman Akuntansi Pemilik**

Pemahaman akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang dinilai penting dimiliki oleh pemilik bisnis. Hal itu dikarenakan sebuah bisnis tentu membutuhkan pengelolaan khususnya dalam hal keuangan, dimana hal tersebut sangat kental dengan ilmu akuntansi. Lestari dan Priyadi (2017) menyatakan bahwa proses pembelajaran akuntansi akan meningkatkan pengetahuan akuntansi pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut juga berlaku pada pemilik UMKM tenun ikat yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pemahaman akuntansi yang baik akan menjadi suatu modal yang penting bagi informan dalam menanggapi adanya SAK EMKM. Selain itu, pemahaman tersebut juga berpengaruh terhadap kesediaannya dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan tidak menyusun laporan keuangan usahanya karena beberapa alasan. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan penggalan informasi terkait pemahaman sederhana para infoman tentang laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan belum memahami dengan jelas terkait tujuan dari laporan keuangan untuk usahanya. Keenam informan mengaku mengetahui, namun hanya 1 (satu) informan saja yang mampu menyebutkan tujuan dari laporan keuangan. Adapun terkait SAK EMKM, dapat disimpulkan bahwa belum ada sosialisasi baik dari dinas koperasi, maupun dinas perindustrian dan perdagangan terkait adanya SAK EMKM.

Berdasarkan hasil temuan tentang pemahaman terkait laporan keuangan dan pemahaman terkait SAK EMKM tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh informan belum memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Hal tersebut terlihat dari mayoritas informan yang belum mampu menyebutkan dengan rinci tujuan dan pentingnya laporan keuangan untuk usahanya. Hal itu juga dibuktikan dengan belum adanya laporan keuangan yang disusun secara sistematis. Selain itu, seluruh informan juga belum mengetahui tentang adanya SAK EMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi informan masih sekedarnya.

### **Pengalaman Menyusun Laporan Keuangan**

Wandini dan Budiasih (2017) menyatakan bahwa pengalaman manajer berpengaruh positif pada penerapan SAK ETAP. Bagian keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, aktif dalam pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Begitu pula dalam penelitian ini, pengalaman dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Informan dalam penelitian ini seluruhnya hanya melakukan pencatatan biasa untuk kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, peneliti menyadari bahwa pengalaman informan dalam menyusun laporan keuangan tentu masih minim. Berdasarkan hasil temuan, terlihat jelas bahwa tidak adanya kewajiban penyerahan laporan keuangan pada pihak perbankan menjadi salah satu penyebab seluruh informan tidak menyusun laporan keuangan. Selain itu, alasan lain seperti tidak adanya waktu luang, jenuh, dan kurang telaten juga turut mendukung tidak disusunnya laporan keuangan usaha. Adapun sejauh ini, seluruh informan juga mengaku masih tetap melakukan pencatatan biasa untuk kegiatan bisnisnya. Oleh karena beberapa kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman informan dalam menyusun laporan keuangan tergolong masih nihil.

### **Pelatihan yang Diikuti Pemilik**

Pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan standar laporan yang berlaku seperti SAK EMKM, salah satunya ditentukan oleh faktor pelatihan sumber daya manusia. Hal tersebut seperti pada penelitian Adiputra *et al* (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Semakin tinggi kualitas pelatihan maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena pada keseluruhan UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini tidak memiliki karyawan khusus yang berada pada bidang keuangan, maka pelatihan dalam hal ini seharusnya diikuti oleh pemilik UMKM. Berdasarkan hasil temuan terkait pelatihan dalam bidang akuntansi dan bidang lain, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya telah ada pelatihan maupun seminar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota maupun dinas terkait. Namun, tidak semua informan mengikuti pelatihan yang diadakan tersebut. Beberapa informan yang jarang mengikuti pelatihan mengaku pelatihan yang diadakan biasanya bersifat kelompok. Adapun informan yang sering mengikuti pelatihan, mengaku belum dapat menjalankan proses penyusunan laporan keuangan secara berkelanjutan karena kurang telaten, tidak adanya waktu luang dan terkadang bingung dengan materi yang diterima saat pelatihan maupun seminar.

### **Kesiapan Sarana Pendukung**

Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM selain membutuhkan pemahaman dan pengalaman dari sumber daya manusia, juga membutuhkan dukungan adanya sarana prasarana yang memadai. Jansen *et al* (2018) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Sarana pendukung dalam penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) yakni *hardware*, *software*, dan jaringan. Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya seluruh informan telah memiliki sarana pendukung *hardware* yakni laptop yang cukup memadai untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Namun, ketiadaan sumber daya manusia yang mampu dalam hal tersebut, kurangnya pemahaman informan tentang tata cara penggunaan sarana pendukung yang ada,

dan tidak adanya waktu luang membuat pemanfaatan *hardware* pada UMKM tenun ikat belum berjalan secara maksimal.

Selain sarana pendukung *hardware*, *software* akuntansi juga merupakan salah satu perangkat penting guna menunjang seluruh kegiatan bisnis. Hal tersebut juga terjadi pada UMKM tenun ikat yang menjadi objek dalam penelitian ini. Seluruh informan mengaku belum memiliki *software* akuntansi apapun untuk menunjang kegiatan bisnis mereka, khususnya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Selain disebabkan karena seluruh informan belum dapat menggunakan *hardware* secara maksimal, ketidaktahuan dan tidak adanya waktu luang juga menjadi alasan yang mendasari belum adanya *software* akuntansi yang dimiliki.

Jaringan tentu dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan bisnis dalam berbagai aspek. Jaringan dapat dimanfaatkan dalam hal sinergisitas antar satu bisnis dengan bisnis lain, baik terkait produk, pemasaran, maupun laporan keuangan. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan internet atau lainnya. Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM tenun ikat yang menjadi objek pada penelitian ini. Jaringan dimanfaatkan untuk memasarkan produk tenun ikat. Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa telah tersedia jaringan internet yang dapat digunakan oleh para informan untuk memasarkan produk secara *online*.

### **Kesiapan Komitmen Organisasi**

Faktor-faktor yang berpengaruh langsung dalam kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM, tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya faktor komitmen dari dalam diri pemilik maupun pelaku organisasi. Sumber daya manusia yang mampu di bidangnya dan sarana pendukung yang optimal tidak akan mampu memberikan pengaruh signifikan jika komitmen organisasi tidak berjalan maksimal. Meriem (dikutip oleh Nova, 2015) menyatakan bahwa komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perkembangan UMKM yang telah mencapai pada suatu titik tertentu, tidak terlepas dari komitmen pemilik dan seluruh komponen di dalamnya untuk peduli terhadap kegiatan bisnis UMKM. Sama halnya dalam hal penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku bagi UMKM.

Seluruh pemilik UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini memang mengakui jika belum secara maksimal dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar. Namun, seluruh informan juga mengakui jika ada keinginan dari dalam diri untuk menyusun laporan keuangan usahanya berdasarkan standar. Meskipun seluruh informan menyatakan bahwa bisnis tenun ikat masih tetap berjalan tanpa adanya laporan keuangan, namun sebenarnya terdapat keinginan untuk adanya perubahan. Perubahan yang nantinya diharapkan dapat membawa kemajuan bagi UMKM tenun ikat. Seluruh informan juga menyatakan bersedia jika nantinya diwajibkan untuk menggunakan SAK EMKM sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan usahanya.

### **Kendala yang Dihadapi**

Pengimplementasian SAK EMKM oleh UMKM tenun ikat yang menjadi objek dalam penelitian ini tentu tidak berjalan begitu saja tanpa adanya kendala. Peneliti menemukan bahwa terdapat kendala-kendala yang mengikuti pada setiap indikator penilaian kesiapan implementasi SAK EMKM tersebut. Kesiapan sumber daya manusia mengalami beberapa kendala, yakni pemahaman akuntansi yang sekedarnya, pengalaman yang nihil, dan pelatihan yang tak berbekas. Kesiapan sarana pendukung mengalami beberapa kendala, yakni *hardware* yang belum dimanfaatkan dan *software* akuntansi yang belum dimiliki.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Temuan Wawancara**

No.	Nama UMKM Tenun Ikat	Kesiapan Sumber Daya Manusia				Kesiapan Sarana Pendukung			Kesiapan Komitmen Organisasi	
		Pendidikan Pemilik	Pemahaman Akuntansi	Pengalaman	Pelatihan	Hardware	Software	Jaringan	Kepedulian terhadap UMKM	Kesediaan Bekerja Ekstra
1.	Kodok Ngorek 2	SMA	x	x	x	√	x	√	√	√
2.	Medali Mas	D-2 SLB	x	x	√	√	x	√	√	√
3.	Sinar Barokah	SMP	x	x	x	√	x	√	√	√
4.	Bandoel Djaya	SMK	x	x	√	√	x	√	√	√
5.	AAM Putra	S-1 Ekonomi	√	x	√	√	x	√	√	√
6.	Siffa	SMA	x	x	√	√	x	√	√	√

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM tenun ikat di Kota Kediri dinilai dari 3 (tiga) indikator yang di dalamnya terdapat beberapa sub indikator penilaian. Ketiga indikator penilaian tersebut saling berkaitan dan UMKM tenun ikat harus memenuhi seluruhnya agar dapat dikatakan siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keenam UMKM tenun ikat belum siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Hal tersebut dikarenakan belum ada satupun UMKM yang memenuhi ketiga indikator penilaian. Mayoritas UMKM hanya memenuhi salah satu indikator, padahal dibutuhkan ketiganya untuk dapat dikatakan siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Adapun kendala yang dihadapi UMKM tenun ikat dalam mengimplementasikan SAK EMKM merupakan masalah yang timbul dari setiap indikator penilaian yang digunakan. Kendala dari kesiapan sumber daya manusia yaitu pemahaman akuntansi yang sekedarnya, pengalaman yang nihil, dan pelatihan yang tak berbekas. Kendala dari kesiapan sarana pendukung yaitu *hardware* yang belum dimanfaatkan dan *software* akuntansi yang belum dimiliki.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah namun demikian masih memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Peneliti menjumpai pemilik UMKM tenun ikat yang telah masuk dalam daftar informan, tidak bersedia dimintai pendapat terkait topik penelitian karena beberapa alasan tertentu.
2. Peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk wawancara dan kurangnya kesempatan untuk menggali informasi lebih rinci dari setiap informan. Hal itu dikarenakan waktu wawancara bertepatan dengan kondisi informan yang lelah setelah bekerja, bersamaan dengan melayani konsumen, maupun menjumpai informan yang kurang tertarik dengan topik penelitian.

## **Saran Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  - a. Pemilik UMKM hendaknya menggali informasi tentang SAK EMKM untuk persiapan implementasi terkait hal tersebut, sekaligus untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.
  - b. Pemilik UMKM yang memiliki keinginan untuk menggunakan *software* akuntansi dalam kegiatan bisnisnya, dapat mencoba menggunakan *Accurate Accounting*, *MYOB Accounting*, dan lain-lain.
2. Bagi Pemerintah

Pemerintah melalui dinas terkait hendaknya mempersiapkan program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk UMKM terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Sektor UMKM yang diteliti dapat diperluas pada sektor-sektor lain, agar tidak hanya berfokus pada UMKM tenun ikat.
  - b. Menggali informasi terlebih dahulu melalui ketua kelompok UMKM terkait informan yang sekiranya bersedia untuk dimintai pendapat tentang topik penelitian, agar peneliti dapat mempersiapkan alternatif informan lain jika terdapat kemungkinan penolakan dari informan sebelumnya.
  - c. Menggunakan triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh melalui proses wawancara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, I. S., Sinarwati, N., & Purnamawati, I. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Karangasem). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Alfitri, A., Ngadiman, & Sohidin. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jupe UNS*, 2(2), 135-147.

- Andriani, N., & Fahminnansih, F. (2013). Branding Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul. *CREATEVITASA*, 2(2),181-194.
- Azhar. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh* (Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara). Diakses dari <https://anzdoc.com/ak26522db4884d7ff377fe52a45177f02b30355.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Bantu UMKM Raih Status Bankable, IAI Sahkan SAK EMKM*. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-960=bantu-umkm-raih-status-%3Ci%3Ebankable%3Ci%3E-iai-sahkan-sak-emkm>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *IAI Siapkan Pilar Baru SAK untuk UMKM*. Diakses dari [http://iaiglobal.or.id/v03/public\\_hearing/detail\\_ph-1.html](http://iaiglobal.or.id/v03/public_hearing/detail_ph-1.html)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Press Release: IAI Siapkan Standar Akuntansi Agar EMKM Capai Literasi Keuangan*. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-917=press-release--iai-siapkan-standar-akuntansi-agar-emkm-capai-literasi-keuangan>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Grha Akuntan
- Jansen, C. F., Morasa, J., & Wang, A. (2018). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 63-71.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016). *Kontribusi UMKM naik*. Diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>
- Lestari, W. S., & Priyadi, M. P. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK–ETAP pada UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(10).
- Miles, Matthew B., Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edisi 3).
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, D. A., Erlina, & Sari, T. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 19(4).
- Norfaliza. (2015). Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Jom FEKON*, 2(2).

- Nova, W. S. (2015). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang). Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1607/1230>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (t.thn.). Diakses dari <http://bppm.kaboki.go.id/index.php/investasi/regulasi?download=7:pp-no-17-2013>.
- Pramono, F. S. (2018). *Resolusi UMKM Indonesia*. Diakses dari Sindo News Online: <https://nasional.sindonews.com/read/1278750/18/resolusi-umkm-indonesia-1517531360/>
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Komunikasi terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 7-11.
- Pratiwi, N. B., & Hanafi, R. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 79-98.
- Putra, H. A., & Kurniawati, E. P. (2012). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Pekan Ilmiah Dosen FEB - Universitas Kristen Satya Wacana*. Diakses dari [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1281/5/PROS\\_Hermon%20AP-Elisabeth%20PK\\_Penyusunan%20Laporan%20Keuangan%20untuk%20Usaha\\_Fulltext.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1281/5/PROS_Hermon%20AP-Elisabeth%20PK_Penyusunan%20Laporan%20Keuangan%20untuk%20Usaha_Fulltext.pdf).
- RRI Online. (2017). *Wali Kota Kediri Imbau UMK Dukung BPS Sukseskan Sensus Ekonomi*. Diakses dari [http://rri.co.id/post/berita/418849/ekonomi/wali\\_kota\\_kediri\\_imbau\\_umk\\_dukung\\_bps\\_sukseskan\\_sensus\\_ekonomi.html](http://rri.co.id/post/berita/418849/ekonomi/wali_kota_kediri_imbau_umk_dukung_bps_sukseskan_sensus_ekonomi.html)
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A skill-Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulaiman, & Abdullah. (2016). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. *JAFFA*, 04(2), 83-100.
- Tuti, R., & Dwijayanti, S. F. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS*. Diakses dari <http://repository.wima.ac.id/990/1/ETR003%20-%20Rias%20Tuti%20%26%20S%2C%20Patricia%20Febrina%20D.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (t.thn.). Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>.
- Wandini, N. Z., & Budiasih, I. A. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Pada Penerapan SAK ETAP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3).
- Wicaksono, A. L. (2016). Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Tentang Pentingnya Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Empiris Pada UMKM di Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.